



Penguatan Sistem Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Transformasi E-Pengendalian Menjadi *Early Warning System*

Hendrik Kresnawan^{1*}

¹ Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Negara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hendrik.kresnawan@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of regional development planning control systems and to identify gaps between planning documents and the realization of programs/activities in Southeast Sulawesi Province. The study employs a descriptive qualitative approach using secondary data, including planning documents (RKPD, Renstra), reports on program realization from regional agencies, and monitoring data from the e-Control system. The analytical methods applied include gap analysis, APKL analysis, USG analysis, and problem tree analysis. The results indicate significant discrepancies between planning and implementation, reflected in deviations between targets and realizations, delays in priority activities, back-loaded budget absorption patterns, and disparities in performance among regional agencies. Furthermore, the e-Control system has not been optimally utilized as an early detection and continuous control instrument. The findings also reveal that the issues are not only technical but also systemic and structural, particularly due to the suboptimal function of the system as an early warning mechanism. This study recommends strengthening the e-Control system as a real-time early warning system, establishing deviation thresholds, enhancing the capacity of regional agencies, and integrating planning and budgeting information systems to improve consistency and effectiveness in regional development implementation.*

Keywords: *Deviation; E-Control System; Monitoring and Evaluation; Planning Control; Regional Development.*

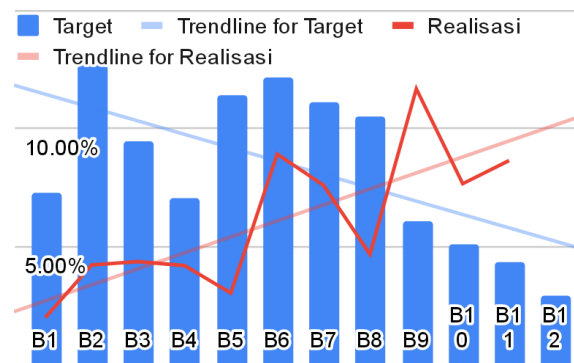
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah serta mengidentifikasi kesenjangan antara dokumen perencanaan dan realisasi program/kegiatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen perencanaan (RKPD, Renstra), laporan realisasi kegiatan perangkat daerah, serta data monitoring dari sistem e-Pengendalian. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis gap, APKL, USG, dan analisis akar masalah (*problem tree analysis*). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan, yang ditandai oleh deviasi target dan realisasi, keterlambatan kegiatan prioritas, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun (*back-loading*), serta ketimpangan kinerja antar perangkat daerah. Selain itu, sistem e-Pengendalian belum berfungsi optimal sebagai instrumen deteksi dini dan pengendalian berkelanjutan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa permasalahan bersifat sistemik dan struktural, terutama terkait belum optimalnya fungsi sistem sebagai *early warning system*. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi e-Pengendalian sebagai sistem deteksi dini berbasis real-time, penetapan ambang batas deviasi, peningkatan kapasitas perangkat daerah, serta integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Deviasi; E-Pengendalian; Monitoring Dan Evaluasi; Pembangunan Daerah; Pengendalian Perencanaan.

1. LATAR BELAKANG

Realisasi anggaran tidak sekadar mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana, tetapi juga menjadi cerminan efektivitas pengelolaan pembangunan. Pelaksanaan anggaran yang terlambat atau tidak sesuai rencana akan berdampak langsung pada tertundanya manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat. Dalam perspektif manajemen keuangan daerah, kinerja pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari efektivitas organisasi Firmansyah (2024), dan prinsip value for money menuntut agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Lestari, 2022). Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi juga merupakan indikator utama akuntabilitas publik (Anwar, 2021).

Pada Tahun Anggaran 2025, pola penyerapan anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dengan konsentrasi pelaksanaan pada pertengahan tahun, dengan target tertinggi pada Februari dan Juni, sedangkan periode Oktober–Desember difokuskan pada penyelesaian kegiatan dan penataan administrasi. Namun, data realisasi hingga November menunjukkan pola yang berbeda: penyerapan awal tahun rendah, percepatan baru terjadi pada triwulan ketiga, dan kembali melambat menjelang akhir tahun. Total capaian realisasi sebesar 66,91% dari pagu, dengan ketimpangan antar perangkat daerah yang menandakan variasi tingkat kesiapan dan kapasitas pelaksanaan.



Gambar 1. Pola Penyerapan Anggaran.

Kondisi ini menimbulkan beberapa tantangan nyata: penumpukan pekerjaan pada akhir tahun, risiko menurunnya kualitas kegiatan, serta potensi dampak pada kinerja fiskal daerah secara keseluruhan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, dan mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian dalam siklus perencanaan belum optimal (Hakim, 2024).

Perencanaan pembangunan daerah adalah siklus yang saling terkait: perumusan dokumen perencanaan → penganggaran → pelaksanaan → pengendalian → evaluasi. Konsistensi antar tahapan ini menjadi prasyarat utama tercapainya target pembangunan daerah. Meskipun e-Pengendalian telah diterapkan sebagai instrumen pengawasan, perannya masih terbatas pada pelaporan perkembangan kegiatan. Sistem ini belum berfungsi sebagai deteksi dini yang mampu menjaga konsistensi antara rencana dan pelaksanaan secara berkelanjutan (Santoso, 2022).

Data dan pola yang ada menegaskan urgensi penguatan sistem pengendalian, terutama dalam memastikan kesiapan kegiatan sebelum ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan menjaga agar distribusi pelaksanaan kegiatan berjalan lebih proporsional sepanjang tahun. Pengelolaan keuangan daerah menuntut keterpaduan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, agar efektivitas pembangunan daerah dapat tercapai secara nyata (Putri, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah merupakan elemen penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Studi oleh World Bank menegaskan bahwa sistem *public financial management* (PFM) yang kuat berkorelasi dengan peningkatan efisiensi belanja publik serta kualitas layanan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengelolaannya (Yusuf & Hasan, 2022).

Penelitian empiris oleh Sari et al. (2022) dalam jurnal keuangan publik di Indonesia menemukan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam aspek efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran. Dengan demikian, manajemen keuangan daerah harus mengedepankan prinsip perencanaan berbasis kinerja serta integrasi antar sistem penganggaran dan pelaksanaan (Kamal, 2024).

Konsep Value for Money

Konsep *value for money* menjadi landasan utama dalam evaluasi kinerja keuangan sektor publik. Penelitian oleh (Wibowo, 2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah memiliki hubungan positif dengan peningkatan kualitas belanja publik.

Selain itu, studi internasional dalam jurnal *Public Administration Review* (Sari, 2023)) menegaskan bahwa implementasi *value for money* mampu meningkatkan akuntabilitas serta kualitas hasil kebijakan publik. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran dapat menjadi indikator belum optimalnya penerapan prinsip ini.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian oleh Pratama & Nugroho (2022) dalam jurnal akuntansi sektor publik menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh transparansi pelaporan serta konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran. Lebih lanjut, studi oleh (Prasetyo & Nugroho, 2024) dalam jurnal *Public Administration* menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas hasil kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keselarasan antara perencanaan dan implementasi menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah (Rahman, 2022).

Siklus Perencanaan Pembangunan

Siklus perencanaan pembangunan terdiri dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Penelitian oleh (Budi & Richana, 2024) menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antar tahapan tersebut menjadi penyebab utama rendahnya serapan anggaran di pemerintah daerah. Selain itu, studi yang dipublikasikan oleh (Hidayat & Wijaya, 2023) menegaskan bahwa kelemahan pada tahap pengendalian dan evaluasi sering menyebabkan deviasi antara rencana dan realisasi program. Oleh karena itu, integrasi antar tahapan dalam siklus perencanaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pembangunan.

Teori Pengendalian (*Management Control*)

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Penelitian oleh Fazillah (2021) dalam jurnal *Management Control Systems* menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang efektif harus mampu mengidentifikasi penyimpangan secara cepat serta menyediakan mekanisme tindakan korektif. Selain itu, penelitian terbaru oleh Tucker & Parker (2023) menekankan pentingnya pendekatan pengendalian berbasis data (*data-driven control systems*) dalam organisasi publik. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan monitoring secara real-time serta meningkatkan respons terhadap potensi risiko.

Early Warning System (EWS)

Early Warning System (EWS) merupakan pendekatan modern dalam sistem pengendalian yang bertujuan mendeteksi potensi deviasi sejak dini. Penelitian oleh Kuntadi & Rosdiana (2022) dalam jurnal *Government Information Quarterly* menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis data real-time mampu meningkatkan akurasi pengawasan serta mempercepat pengambilan keputusan.

Selain itu, studi oleh Sujaya (2022) menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem pemantauan pembangunan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, implementasi EWS menjadi strategi penting dalam mengurangi keterlambatan pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dan realisasi program/kegiatan pembangunan daerah. Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual sekaligus menganalisis faktor penyebab serta merumuskan alternatif kebijakan yang relevan dalam penguatan sistem pengendalian perencanaan.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan menitikberatkan pada penguatan sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Fokus penelitian diarahkan pada upaya memahami dan menganalisis keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah (OPD). Secara lebih spesifik, penelitian ini mengkaji tingkat konsistensi antara rencana dan realisasi pelaksanaan pembangunan, termasuk fenomena deviasi kegiatan, keterlambatan pelaksanaan, serta pola penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun (*back-loading*). Kondisi tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan sistemik yang memengaruhi efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pemanfaatan sistem e-Pengendalian sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan.

Kajian dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut telah berfungsi dalam mendukung proses pengendalian, khususnya dalam mendeteksi deviasi secara dini (*early warning*), menyediakan informasi real-time, serta mendorong pelaksanaan intervensi korektif yang tepat waktu. Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting pengendalian perencanaan, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi serta merumuskan kebutuhan penguatan sistem e-Pengendalian agar mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan sistem informasi yang relevan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Data sekunder tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), serta dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, digunakan pula laporan realisasi program dan kegiatan

perangkat daerah (OPD) untuk mengidentifikasi tingkat capaian kinerja serta kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan (Hamzah et al., 2022).

Data monitoring dan evaluasi pembangunan juga dianalisis untuk melihat dinamika pelaksanaan kegiatan secara periodik, termasuk capaian indikator kinerja dan potensi deviasi yang terjadi. Lebih lanjut, penelitian ini memanfaatkan data dari sistem e-Pengendalian sebagai sumber informasi utama dalam menilai efektivitas sistem pengendalian, khususnya dalam memantau realisasi kegiatan, mendeteksi keterlambatan, serta mengidentifikasi pola pelaksanaan program secara *real-time* (Nasri & Zubaili, 2024).

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan literatur ilmiah dan regulasi yang relevan sebagai data pendukung. Kajian literatur mencakup teori dan konsep terkait pengendalian perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan. Sementara itu, regulasi digunakan untuk memahami kerangka kebijakan dan kewenangan institusi dalam pengelolaan perencanaan pembangunan daerah. Kombinasi data tersebut diharapkan mampu memberikan dasar analisis yang komprehensif, objektif, dan kontekstual dalam menjelaskan permasalahan serta merumuskan alternatif kebijakan yang tepat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, laporan realisasi program dan kegiatan, serta data monitoring dan evaluasi yang bersumber dari perangkat daerah dan sistem e-Pengendalian. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara rencana dan realisasi, termasuk pola deviasi kegiatan, keterlambatan pelaksanaan, serta ketidakkonsistenan dalam pencapaian target pembangunan. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengendalian perencanaan pembangunan dan sistem monitoring berbasis teknologi. Kajian ini bertujuan untuk memperkuat landasan konseptual penelitian, sekaligus memberikan kerangka analisis dalam memahami permasalahan serta merumuskan alternatif kebijakan yang tepat (Saibil & Haq, 2024).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, analisis gap digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target perencanaan dan realisasi program/kegiatan sebagai dasar dalam menemukan permasalahan utama pengendalian pembangunan. Selanjutnya, dilakukan analisis APKL (Aktualitas, Problematik, Kelayakan, dan Kewenangan) untuk menyeleksi permasalahan berdasarkan tingkat relevansi,

kompleksitas, kelayakan penanganan, serta kesesuaian dengan kewenangan institusi. Setiap permasalahan diberi skor untuk menentukan prioritas awal. Tahap berikutnya adalah analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) yang digunakan untuk menetapkan prioritas masalah strategis berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masalah. Terakhir, dilakukan analisis akar masalah (*problem tree analysis*) untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat secara sistematis, mulai dari akar masalah, masalah antara, hingga dampak yang ditimbulkan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan (Qosyim & Zarkasyi, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Identifikasi Kesenjangan (Gap) Perencanaan dan Realisasi

Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah (OPD). Kesenjangan ini mencerminkan belum optimalnya sistem pengendalian perencanaan dalam menjaga konsistensi antara rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan.

Secara lebih rinci, kesenjangan tersebut terlihat melalui beberapa fenomena utama. Pertama, masih terdapat kegiatan prioritas dan kegiatan wajib yang tidak terlaksana tepat waktu, sehingga berdampak pada tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Kedua, terjadi deviasi antara target dan realisasi kegiatan yang menunjukkan rendahnya tingkat konsistensi dalam pelaksanaan program, baik dari sisi waktu maupun capaian kinerja.

Selain itu, ditemukan pola penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk pada akhir tahun (*back-loading*), yang tidak hanya mengganggu ritme pelaksanaan kegiatan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas output pembangunan akibat tekanan waktu pelaksanaan. Kondisi ini diperparah oleh adanya ketimpangan kinerja antar perangkat daerah, yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan menjadi tidak merata dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan capaian antar sektor.

Lebih lanjut, sistem monitoring yang tersedia, khususnya melalui e-Pengendalian, belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen deteksi dini (*early warning system*) dan pengendalian berkelanjutan. Informasi terkait deviasi kegiatan belum sepenuhnya tersedia secara real-time, sehingga tindakan korektif seringkali terlambat dilakukan dan masalah cenderung berulang. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa permasalahan yang

terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah belum mampu secara efektif menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan secara berkelanjutan.

Hasil Analisis APKL

Analisis APKL dilakukan untuk menyeleksi permasalahan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu aktualitas, problematik, kelayakan, dan kewenangan. Melalui proses penilaian dengan pemberian skor pada setiap kriteria, diperoleh gambaran mengenai tingkat prioritas masing-masing permasalahan dalam konteks pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang memiliki tingkat prioritas tinggi. Permasalahan tersebut meliputi belum optimalnya pemanfaatan e-Pengendalian sebagai instrumen korektif dan deteksi dini, pola pelaksanaan kegiatan yang cenderung menumpuk pada akhir tahun (*back-loading*) sehingga mengganggu konsistensi pelaksanaan, serta belum adanya ambang batas deviasi yang jelas sebagai dasar dalam melakukan intervensi terhadap keterlambatan kegiatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut memperoleh skor tertinggi karena memiliki tingkat aktualitas yang tinggi, sering terjadi secara berulang, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan. Selain itu, seluruh permasalahan tersebut berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah, sehingga secara kelembagaan memungkinkan untuk ditangani melalui perbaikan sistem pengendalian perencanaan. Dengan demikian, hasil analisis APKL menegaskan bahwa ketiga isu tersebut merupakan permasalahan kunci yang perlu menjadi fokus utama dalam upaya penguatan sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Hasil Analisis USG

Berdasarkan hasil analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), diperoleh bahwa permasalahan yang memiliki tingkat prioritas tertinggi adalah belum optimalnya pemanfaatan e-Pengendalian sebagai instrumen korektif dan deteksi dini dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Penilaian ini didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu tingkat urgensi, tingkat keseriusan dampak, serta potensi perkembangan masalah.

Dari aspek urgensi, permasalahan ini dinilai mendesak karena secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Dari aspek keseriusan, kelemahan dalam fungsi e-Pengendalian berdampak signifikan terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan, yang ditandai dengan munculnya deviasi kegiatan, keterlambatan pelaksanaan, serta

ketidakseimbangan kinerja antar perangkat daerah. Sementara itu, dari aspek growth, permasalahan ini memiliki potensi untuk terus berulang dan bahkan meningkat jika tidak segera ditangani secara sistematis, mengingat sistem pengendalian yang ada belum mampu mendeteksi dan merespons deviasi secara dini.

Dengan demikian, hasil analisis USG menegaskan bahwa penguatan fungsi e-Pengendalian merupakan prioritas utama dalam upaya perbaikan sistem pengendalian perencanaan pembangunan. Optimalisasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas monitoring, mempercepat intervensi korektif, serta menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan secara berkelanjutan.

Hasil Analisis Akar Masalah (Problem Tree)

Hasil analisis akar masalah (*problem tree analysis*) menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah memiliki struktur yang saling terkait, mulai dari dampak yang muncul di permukaan hingga akar penyebab yang bersifat sistemik dan struktural. Pada level dampak, permasalahan terlihat dari penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun yang mengindikasikan pola kerja yang tidak merata sepanjang tahun anggaran. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan kualitas output kegiatan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan, serta keterlambatan dalam penyampaian manfaat pembangunan kepada masyarakat.

Dampak tersebut dipengaruhi oleh sejumlah masalah antara, antara lain terjadinya deviasi antara perencanaan dan realisasi kegiatan, pola pelaksanaan yang cenderung back-loading, ketimpangan kinerja antar perangkat daerah (OPD), serta keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas. Masalah-masalah ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi perencanaan pembangunan. Lebih dalam, akar permasalahan terletak pada belum optimalnya sistem pengendalian perencanaan dalam menjalankan fungsi deteksi dini dan intervensi korektif secara efektif. Sistem yang ada belum mampu mengidentifikasi potensi deviasi sejak awal maupun mendorong tindakan korektif secara tepat waktu.

Secara struktural, permasalahan ini diperkuat oleh belum difungsikannya e-Pengendalian sebagai sistem early warning yang terintegrasi dan mampu menyediakan informasi deviasi secara *real-time*. Keterbatasan ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang responsif terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga mencerminkan kelemahan pada aspek sistemik dan struktural dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah, sehingga memerlukan pendekatan perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah terletak pada belum optimalnya sistem dalam menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. Temuan berupa deviasi kegiatan, pola *back-loading*, serta ketimpangan kinerja antar perangkat daerah mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam mekanisme pengendalian yang berjalan.

Secara konseptual, pengendalian perencanaan pembangunan seharusnya mampu memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, sistem monitoring yang ada belum mampu berfungsi sebagai instrumen deteksi dini (*early warning system*) yang efektif. Hal ini terlihat dari masih terjadinya keterlambatan dalam mengidentifikasi deviasi, sehingga intervensi korektif tidak dilakukan secara tepat waktu.

Temuan terkait pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun (*back-loading*) menunjukkan bahwa proses pengendalian belum berjalan secara proaktif, melainkan masih bersifat reaktif. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pelaksanaan kegiatan serta meningkatnya risiko tidak tercapainya target pembangunan secara optimal. Selain itu, ketimpangan kinerja antar perangkat daerah menunjukkan belum adanya mekanisme pengendalian yang mampu menjaga keseimbangan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Hasil analisis APKL dan USG memperkuat bahwa permasalahan yang paling krusial adalah belum optimalnya pemanfaatan e-Pengendalian sebagai instrumen pengendalian yang sistematis. Sistem ini belum mampu menyediakan informasi deviasi secara *real-time*, belum memiliki ambang batas (*threshold*) yang jelas, serta belum mendorong tindakan korektif yang terstruktur. Akibatnya, potensi masalah tidak terdeteksi sejak dini dan cenderung berulang dalam siklus perencanaan berikutnya.

Dari perspektif analisis akar masalah, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada desain sistem pengendalian itu sendiri. e-Pengendalian belum difungsikan secara optimal sebagai *Early Warning System* (EWS) yang mampu mengintegrasikan data perencanaan, realisasi, dan monitoring secara komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian yang tidak hanya berfokus pada pelaporan, tetapi juga pada kemampuan deteksi dini dan intervensi korektif. Transformasi e-Pengendalian menjadi *Early Warning System* yang terintegrasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem ini

diharapkan mampu memberikan notifikasi secara *real-time*, menetapkan ambang batas deviasi yang jelas, serta mendorong respons cepat dari perangkat daerah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan fungsi pengendalian sebagai instrumen pengendalian yang proaktif, sistematis, dan terintegrasi merupakan langkah kunci dalam mengatasi permasalahan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, serta dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara belum mampu menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya deviasi antara target dan realisasi, pola pelaksanaan kegiatan yang cenderung menumpuk pada akhir tahun (*back-loading*), serta ketimpangan kinerja antar perangkat daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pemanfaatan e-Pengendalian sebagai instrumen pengendalian yang mampu menjalankan fungsi deteksi dini dan intervensi korektif. Sistem yang ada belum menyediakan informasi deviasi secara *real-time* dan belum memiliki mekanisme yang mendorong respons cepat terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga permasalahan cenderung berulang dalam siklus perencanaan berikutnya.

Lebih lanjut, analisis akar masalah menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sistemik dan struktural, terutama terkait dengan desain dan fungsi sistem pengendalian yang belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem e-Pengendalian menjadi *Early Warning System* yang mampu mendeteksi deviasi secara dini, menyediakan informasi *real-time*, serta mendorong intervensi korektif secara tepat waktu.

Dengan demikian, optimalisasi sistem pengendalian perencanaan melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi menjadi kunci dalam meningkatkan konsistensi pelaksanaan pembangunan, mempercepat distribusi manfaat kepada masyarakat, serta memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan belum optimalnya sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan fungsi e-Pengendalian tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi sebagai early warning system yang mampu mendeteksi deviasi secara real-time serta memberikan notifikasi terhadap potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu ditetapkan ambang batas deviasi (*threshold*) yang jelas antara perencanaan dan realisasi sebagai dasar dalam melakukan intervensi korektif secara tepat waktu.

Selain itu, perbaikan pola penyerapan anggaran juga perlu dilakukan untuk menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun (*back-loading*), melalui perencanaan waktu yang lebih realistis dan monitoring berkala yang lebih ketat. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada perangkat daerah (OPD) menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program, yang diiringi dengan evaluasi kinerja secara periodik guna mengurangi ketimpangan antar OPD.

Lebih lanjut, penguatan integrasi sistem informasi, khususnya antara e-Planning, e-Budgeting, dan e-Pengendalian, perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi data dan mendukung proses monitoring serta evaluasi secara menyeluruh. Upaya tersebut harus didukung oleh kebijakan yang kuat dan komitmen pimpinan daerah dalam mendorong pemanfaatan sistem pengendalian berbasis data secara optimal.

Akhirnya, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti metode kuantitatif atau mixed-method, dengan cakupan wilayah yang lebih luas guna menguji secara empiris pengaruh sistem e-Pengendalian terhadap kinerja pembangunan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Biro Administrasi Pembangunan, yang telah memberikan akses data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh perangkat daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam penyediaan data serta mendukung proses analisis. Selain itu, penulis mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan selama proses penyusunan naskah ini.

Penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan kajian kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengendalian perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, S. (2021). Economic empowerment and education sustainability. *Journal of Education Policy*, 36(5), 623–640.
- Budi, M. H. S., & Richana, S. A. (2024). Manajemen strategi pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dalam meningkatkan kualitas hafalan santri di pesantren. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 859–870. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v7i2.1364>
- Fazillah, N. (2021). Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan nonformal. *Intelektualita*, 8(2), 1–9.
- Firmansyah, D. (2024). Business unit development in Islamic education institutions. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 145–160.
- Hakim, L. (2024). Innovation in education financing through community-based enterprises. *International Journal of Educational Development*, 98, 102745.
- Hamzah, M., Febrianto, A., Yakin, A., Nurbayah, S., & Riyantoro, S. F. (2022). Penguatan ekonomi pesantren melalui digitalisasi unit usaha pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1040–1047. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4730>
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2023). Financial management in Islamic educational institutions: A contemporary approach. *International Journal of Educational Management*, 37(2), 210–225.
- Kamal, M. (2024). Social entrepreneurship in education sector: Evidence from developing countries. *Social Enterprise Journal*, 20(1), 77–95.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>
- Lestari, P. (2022). Cost efficiency in nonformal education institutions. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 5(1), 55–70.
- Nasri, N., & Zubaili, Z. (2024). Pengembangan unit usaha pesantren produksi sabun cair Dayah Darusa'adah. *BA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 29–34. <https://doi.org/10.58477/ba.v2i2.234>

- Prasetyo, A. B., & Nugroho, Y. (2024). Entrepreneurship-based funding in nonformal education institutions. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 45–60.
- Putri, R. A. (2023). Budget planning effectiveness in education sector. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(1), 12–25.
- Qosyim, R. A., & Zarkasyi, A. (2024). Management of Islamic philanthropy-based education financing in increasing access to free education for orphan children. *Munaddhomah*, 5(3), 270–283. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v5i3.1137>
- Rahman, A. (2022). Sustainable financing models in Islamic education. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 567–580.
- Saibil, D., & Haq, F. (2024). Mendorong ekonomi lokal melalui unit usaha pesantren: Peran inovasi pesantren. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 385–392. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i2.3256>
- Santoso, H. (2022). Financial governance in nonformal education institutions. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 200–215.
- Sari, D. M. (2023). Financial independence of Islamic boarding schools through business units. *Journal of Islamic Education Studies*, 11(2), 134–150.
- Sujaya, K. (2022). Financing management in Islam-based schools in the city of Tasikmalaya. *Dinamika Ilmu*, 22(2), 507–527.
- Wibowo, A. (2021). Education financing and sustainability: A case study approach. *Educational Research Review*, 16(3), 88–102.
- Yusuf, M., & Hasan, A. (2022). Islamic philanthropy and education financing. *Journal of Muslim Philanthropy*, 6(2), 101–118.